BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari paparan pembahasan dan hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai Kebijakan Luar Negeri Irak terhadap Iran pada masa Pemerintahan Nouri al-Maliki (2006-2014), maka peneliti menarik beberapa kesimpulan diantaranya :

1. Naiknya pemerintahan Maliki dianggap sebagai representasi kemenangan kubu pro Iran di Irak. Hubungan luar negeri diperkuat dengan kesamaan mazhab dan budaya yaitu sebagai negara dengan mazhab Islam Syiah terbesar di Timur Tengah. Tujuan lain dari kebijakan Irak terhadap Iran pada masa Maliki adalah untuk menciptakan peluang ekonomi budaya dan politik. Perdagangan Irak secara tradisional berorientasi ke dunia Arab melalui Yordania di barat dan Turki dan negara-negara Blok Soviet di utara. Namun pasca asca naiknya pemerintahan Maliki peluang Kerjasama Ekonomi, politik dan budaya kedua negara semakin meningkat.

Irak yang berbatasan langsung dengan Iran menjadikan Irak sebagai prioritas keamanan Iran. Pada masa pemerintahan Maliki dihadapkan beberapa krisis politik yang melanda Irak diantaranya meningkatnya isu terorisme, meningkatnya isu sekterian, separatisme Iran menganggap

meningkatnya terorisme di Irak karena adanya pengaruh intervensi politik dalam negeri Irak dan dukungan Asing atas memanasnya kondisi politik di Irak era Maliki. Isu Separatisme Kurdistan, sentimen mazhab pada masa pemerintahan Maliki menjadikan Irak memerlukan dukungan Iran. Disamping itu Iran juga berkepentingan dengan stabilitas Irak. Sebab krisis politik pada masa pemerintahan Maliki telah banyak menimbulkan kerugian bagi Iran, terutama di wilayah perbatasan maraknya perdagangan narkoba, penyelundupan senjata, dan aksi-aksi terorisme dari kelompok-kelompok anti-Iran yang berasal dari Irak.

3. Iran merupakan Negara yang mempunyai pengaruh besar terhadap percaturan politik Irak terlebih terhadap milisi Syiah di Irak. Sebagai negara Syiah terbesar didunia, Iran berhasil menanamkan pengaruhnya kepada Irak khususnya milisi Syiah pasca naiknya pemerintahan Maliki. Iran menganggap Maliki adalah teman dekat. Kepentingan Maliki terhadap Iran banyak dan didorong oleh kepentingan strategis, agama, dan pribadi. Iran yang ingin mempertahankan stabilitas Irak di masa Maliki sebagai sekutu terdekat kedua setelah Suriah. Iran ingin mempertahankan pengaruhnya di Irak dan hubungan dekat melalui pemerintahan Maliki. Iran memiliki kepentingan untuk melindungi peziarah Iran di Irak, investasi pemerintah Iran yang didominasi di selatan Irak. Iran juga mengutamakan keamanan kota kota suci bagi kelompok Islam Syiah

seperti Karbala, Najaf, Samarra, Qadimiyah yang sering dijadikan target serangan oleh kelompok teroris.

Kebijakan luar negeri Irak terhadap Iran di bawah pemerintahan Maliki dinilai berusaha menjadikan Iran sebagai sekutu dan menganggap Iran sebagai negara terpenting bagi Irak. Pemerintahan Maliki mengakui pengaruh Iran yang cukup kuat di Irak, namun ia juga tidak menginginkan Iran memonopoli pengaruhnya di Irak dan berharap Iran memainkan peran positif dalam memediasi krisis politik yang melanda Irak.

5.2 Saran

Penelitian ini dapat dijadikan rujukan atau sumber bagi peneliti yang akan mengangkat Kebijakan Luar Negeri irak terhadap Iran pada masa Maliki. Saya mengakui terdapat sedikit kekurangan dalam penelitian yang saya lakukan, diharapkan pada penelitian selanjutnya mahasiswa dapat lebih menyempurnakannya. Sebagai kepala pemerintahan satu negara peneliti menyampaikan beberapa saran atas kepeminpinan Maliki diantaranya :

1. Untuk menjalankan pemerintahan yang adil bagi semua etnis dan kelompok di Irak, Maliki sebaiknya merangkul kelompok kelompok minoritas di Irak seperti kelompok Sunni, Kurdi untuk membentuk pemerintahan persatuan nasional Irak.

2. Maliki sebagai pemimpin Irak sebaiknya memilih menyelesaikan krisis politik Irak yang melibatkan semua elemen masyarakat Irak dan kepala suku di Irak melalui dialog nasional.
3. Maliki juga sebaiknya menjauhkan diri dari kebijakan-kebijakan politik yang berbau sekterian.
4. Untuk negara kawasan yang bertetangga langsung dengan Irak sebaiknya tidak mengintervensi urusan politik dalam negeri Irak dan menghentikan dukungan terhadap kelompok faksi maupun milisi yang berada di Irak.
5. Untuk kelompok mazhab, etnis, dan faksi politik di Irak sebaiknya mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan golongan.
6. Untuk badan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sebaiknya mendorong aliansi Internasional untuk membantu menyelesaikan masalah krisis politik Irak.